

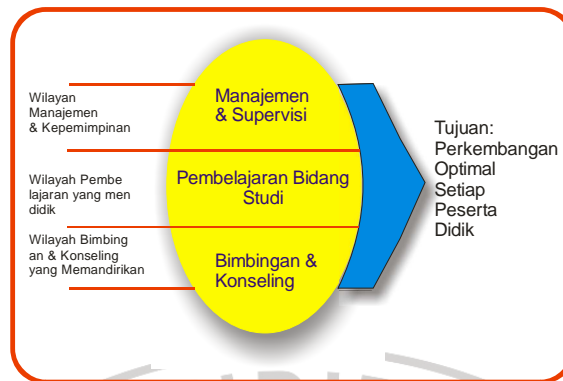
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama dalam pendidikan secara sinergis, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional, serta bidang pembinaan siswa (bimbingan dan konseling). Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek *psikososiospiritual*. (Djawad Dahlan & Juntika, 2007: 173; Sunaryo, 2008: 185)

Dengan demikian pelaksanaan proses pendidikan di semua jalur penyelenggara pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal wilayah layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang optimal. Keterhubungan antara tiga komponen tersebut, yaitu wilayah kepemimpinan dan administrasi, wilayah pembelajaran yang mendidik, dan wilayah bimbingan dan konseling digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1:
Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2008)

Keterhubungan secara sinergis ketiga komponen tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab II, Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah administrasi dan kepemimpinan, wilayah pembelajaran serta wilayah pelayanan bimbingan dan konseling merupakan indikator untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Namun, sampai saat ini untuk program layanan bimbingan dan konseling baru menyentuh pada jalur pendidikan persekolahan (formal), sedangkan pada program

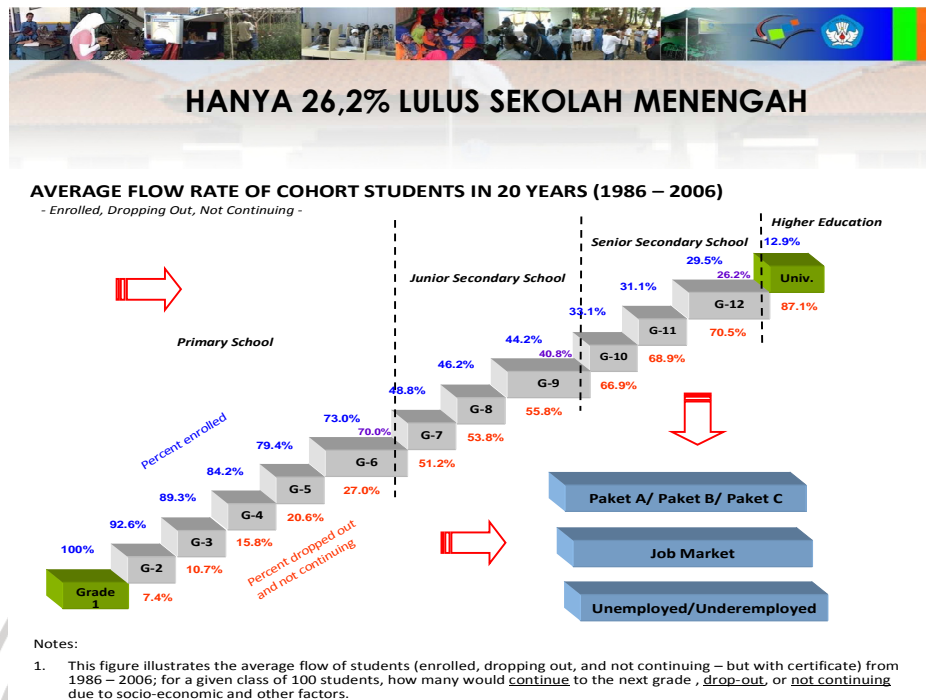
pendidikan kesetaraan layanan bimbingan dan konseling masih berbentuk konvensional (biasa) yang bersifat situasional, tidak terprogram sesuai dengan aturan layanan bimbingan dan konseling. Padahal jika dibandingkan permasalahan keberadaan peserta didik pada pendidikan kesetaraan sangat kompleks, diantaranya diakibatkan oleh faktor ekonomi, orang tua/keluarga, lingkungan, letak geografis, psikologi, sosial budaya, narkoba/minuman keras, anak-anak jalanan, *drop out* pendidikan formal, dan tidak lulus Ujian Nasional pendidikan formal maupun nonformal.

Oleh karena itu, program layanan bimbingan dan konseling disemua jalur pendidikan yang ada di Indonesia sangat diperlukan keberadaanya sebagai upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Rochman Natawidjaja (1987: 37) yang mengartikan bahwa bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Selanjutnya Ace Suryadi (2008:13) menyatakan bahwa: “Program Pendidikan kesetaraan memiliki posisi strategis untuk mengatasi paling tidak tiga tantangan penting, yakni *pertama*, membantu penuntasan program Wajib Belajar

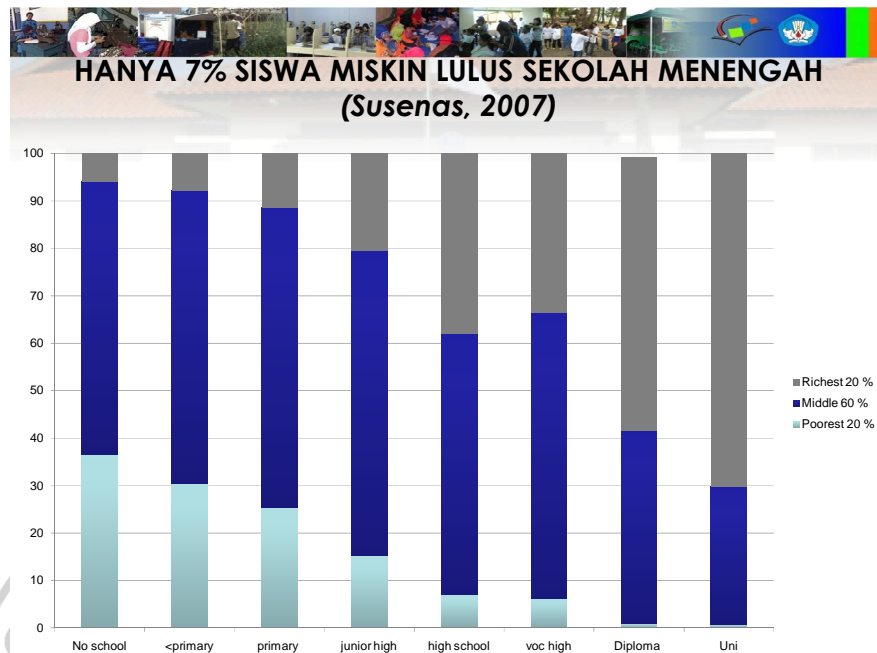
Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan mengambil kembali anak-anak yang mengalami putus sekolah di pendidikan dasar dan mengajak anak-anak yang tidak/belum bersekolah di pendidikan formal karena miskin, hambatan geografis, atau alasan lain untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. **Kedua**, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar yang tidak melanjutkan dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah di pendidikan menengah, untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C, serta **ketiga** memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup dengan keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja, dan kemampuan merintis dan mengembangkan usaha mandiri (*entrepreneurship*), dalam rangka membantu mengatasi pokok persoalan mereka yaitu ketidak berdayaan secara ekonomi.

Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI) Harris Iskandar Region I Jayagiri Lembang dalam seminar bimbingan dan konseling di Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana UPI Bandung pada akhir paparannya mengatakan bahwa bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan di dunia pendidikan nonformal. (2008). Hal ini diperkuat dengan data rata-rata peserta didik dalam 20 tahun (1985-2005) hanya 26,2% lulus sekolah menengah, sehingga sisanya sekitar 74,8% kemungkinan yang tidak lulus tersebut menjadi bagian garapan pendidikan kesetaraan, bekerja di perusahaan-perusahaan, atau tidak bekerja/ pengangguran, data tersebut sebagai berikut:



Gambar 1.2:
Rata-rata Lulus Sekolah Menengah

Selanjutnya Haris Iskandar memperkuat pernyataan terakhir dalam seminar itu dengan data dari hasil Sensusnas tahun 2007 tentang Data Siswa Miskin yang Lulus Sekolah Menengah bahwa hanya 7% siswa miskin yang lulus sekolah menengah atas, 15% untuk sekolah menengah dan 23% untuk sekolah dasar. Kenyataan ini pun menjadi garapan besar bagi pendidikan nonformal, sebagai penguat dari data tersebut disajikan gambar berikut ini:



Gambar 1.3
Data Siswa Miskin Lulus Sekolah Menengah

Dari data tersebut, jelas sekali bagi mereka yang tidak tamat di pendidikan formal dan data siswa miskin yang tidak bersekolah di pendidikan formal merupakan garapan dunia pendidikan nonformal, salah satunya adalah pendidikan kesetaraan, artinya dengan berbagai permasalahan yang kompleks pada diri peserta didik yang diakibatkan oleh berbagai hal tersebut memerlukan layanan bimbingan dan konseling sehingga diharapkan mereka dapat menikmati pendidikan sebagai hak setiap warga Negara Indonesia.

Data Ujian Nasional tahun pelajaran 2010/2011 rata-rata nasional nilai kelulusan UN SMP/MTs adalah 7,56. Tahun ini, dari 3.714.216 siswa SMP/MTs yang mendaftar ujian nasional (UN), hanya 3.660.803 siswa yang mengikuti UN dan sebanyak 3.640.569 atau 99,45 % yang dinyatakan lulus. Sementara itu, 20.234 siswa SMP/MTS atau 0,55 persen siswa lainnya dinyatakan tidak lulus.

(<http://mediaanakindonesia.wordpress.com>. diunduh tanggal 19 Juni 2011, pukul 19.00). Sementara itu, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Mutendik) Depdiknas Fasli Jalal mengatakan siswa yang tidak lulus ada dua opsi, yaitu kembali ke kelas tiga atau mengikuti program kelompok belajar (kejar) paket B (untuk SLTP) dan paket C (untuk SLTA) yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang. (<http://berita.kapanlagi.com>, diunduh tanggal 19 Juni 2011, pukul 18.45).

Memperhatikan data-data dan uraian yang diutarakan di atas, sejalan dengan perkembangan program bimbingan dan konseling yang masih terfokus pada kegiatan pendidikan formal bahkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) pun belum merancang dan menerbitkan sebuah buku tentang rambu-rambu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, semiloka dan *work shop* masih dominan permasalahan yang diangkat pada layanan bimbingan dan konseling di pendidikan formal. Padahal sangat jelas sekali peserta didik yang berada pada pendidikan kesetaraan membutuhkan layanan bimbingan dan konseling.

Dari fenomena inilah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan fokus model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan. Model yang dihasilkan diharapkan jika diimplementasikan dapat meningkatkan layanan bimbingan dan konseling dan sistem manajemen bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan.

B. Masalah Penelitian

Layanan bimbingan dan konseling di Pendidikan Nonformal di Indonesia khususnya di Program Pendidikan Kesetaraan seharusnya sudah berjalan sejak keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B, karena pada saat ini bersamaan diterbitkannya buku acuan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Di dalam buku acuan tersebut pada bagian Pelaksanaan Program tertuang bahwa setiap penyelenggara harus memulai kegiatan belajar sesuai dengan jadwal pelajaran, melaksanakan kegiatan belajar, memberi bimbingan baik secara individu maupun kelompok, dan melaksanakan evaluasi.

Di dalam sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, sampai dewasa ini, kualitas pendidikan di Indonesia baru secara individu atau perorangan dapat diandalkan keberadaannya, tetapi secara kelompok atau menyeluruh kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, salah satunya adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik belum optimal, baik dari segi kualitas layanan maupun dalam sistem manajemen yang diterapkan.

Dengan demikian, untuk menyajikan layanan bimbingan dan konseling yang memiliki kualitas dan sistem pengelolaan yang baik, yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kualitas pendidikan, khususnya pada pendidikan kesetaraan perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang sesuai.

Upaya tersebut adalah upaya yang tepat dan terarah kepada peningkatan kualitas layanan dan sistem pengelolaan bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan yang diciptakan secara proposional dengan dilandasi pertimbangan yang komprehensif akan faktor-faktor yang relevan. Dengan demikian, upaya tersebut selayaknya dikemas dalam suatu rencana atau pola kegiatan sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai “model bimbingan dan konseling”.

Model bimbingan dan konseling tersebut, selayaknya diorientasikan kepada upaya membantu peserta didik mencapai tahap perkembangan yang optimal melalui interaksi yang sehat antara dirinya dengan lingkungannya. Model yang dimaksud adalah melalui implementasi model layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan.

Untuk menghasilkan model bimbingan dan konseling di program pendidikan kesetaraan, perlu pengkajian secara mendalam dan akurat faktor-faktor yang relevan dan mendasarinya, yang alternatifnya adalah faktor-faktor/aspek aktual layanan bimbingan dan konseling bidang akademik (belajar), pribadi, sosial, dan karir. Dengan cara membandingkan kondisi aktual dan idealnya, maka akan ditemukan kesenjangannya, dari kesenjangan inilah dapat dirumuskan kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terpenuhi secara optimal dan perlu mendapatkan intervensi bimbingan dan konseling. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang akan dijadikan dasar pengembangan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan. Dengan

proses demikian, maka model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang dimaksud akan terwujud.

Meskipun nanti model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan terwujud, jika tanpa implementasi nyata yang disertai motivasi yang tinggi dan kemampuan yang memadai dari penyelenggara (Penyelenggara, Tutor, Staf TU) dan yang terkait lainnya, maka mustahil menarik kesimpulan dapat diterapkan tidaknya pengembangan model penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan dan dampaknya. Oleh karena itu, ada dan tidak adanya motivasi dan kemampuan para penyelenggara pengembangan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan dan dampaknya merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

Namun, yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan efektif dalam meningkatkan kompetensi bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut: “Seperti apa model pelaksanaan layanan bimbingan dan

konseling yang efektif bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan?”

Dengan mengacu pada rumusan masalah secara umum tersebut, maka rumusan permasalahannya secara khusus berbentuk pertanyaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Seperti apa model pelaksanaan layanan bimbingan bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan?
2. Apakah model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling efektif dalam meningkatkan kompetensi bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Serangkaian upaya untuk menghasilkan pengembangan model penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang menunjukkan peningkatan layanan bimbingan dan konseling pada aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir melalui identifikasi hasil angket/kuisisioner yang disampaikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah pelaksanaan model (perlakuan)
2. Uji-Rasional model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang dihasilkan adalah dalam rangka validasi model yang akan diimplementasikan di lapangan (uji-empirik/uji coba)

3. Implementasi atau uji lapangan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang dihasilkan adalah dalam rangka menemukan dampaknya terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang efektif bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir di PKBM Harapan Bangsa Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan proses pengembangannya, model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang dihasilkan ini didasarkan kepada data empirik tentang layanan bimbingan dan konseling untuk bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir.

- b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan teori tentang dasar-dasar konseptual suatu model bimbingan dan konseling yang menggunakan pendekatan komprehensif bagi peserta didik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan diperolehnya gambaran aktual tentang penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik program pendidikan kesetaraan sehingga gambaran tersebut dijadikan sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan bagi perumusan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang menunjukkan efektifitas pada kualitas layanan bimbingan dan konseling pada bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir.
- b. Dengan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan yang ditemukan, secara praktis dapat memperkaya model yang sudah ada sekaligus memberikan alternatif model layanan bimbingan dan konseling yang lebih berbobot karena kelebihan yang dimilikinya. Dengan demikian kepada para pembuat kebijakan maupun praktisi dilapangan, mandapat manfaat besar berupa meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling yang diimplementasikan.
- c. Dengan mengimplementasikan model pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik pada program pendidikan kesetaraan temuan penelitian ini, memungkinkan terjadinya layanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan sistematis. Dengan demikian model ini sangat bermanfaat

bagi upaya membantu peserta didik dalam mencapai tujuan perkembangan yang membutuhkan bimbingan secara sistematis.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan merupakan “*helping*” yang identik dengan “*aiding, assisting, atau availing*”, yang berarti bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan menunjukkan bahwa yang aktif mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah individu atau peserta didik sendiri. Dalam proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan kehendak sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator perkembangan individu. Istilah bantuan dalam bimbingan juga dapat juga dimaknai upaya untuk; (a) menciptakan lingkungan (fisik, psikis, social, dan spiritual) yang kondusif bagi perkembangan siswa, (b) memberikan dorongan dan semangat, (c) mengembangkan keberanian bertindak dan bertanggung jawab, (d) mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki dan mengubah perilakunya sendiri. (Mohammad Djawad Dahlan, 2007: 174)
2. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan kepada pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian yang professional peserta didik. Hasil dari pendidikan kesetaraan ini setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau

pemerintah daerah, dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal. (Dirjen PNFI Depdiknas, 2008: 2; Akhmad Sudrajat, 2008: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>).

3. Konseli atau peserta didik sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (*on becoming*), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan layanan bimbingan dan konseling, karena konseli secara umum masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. (Akhmad Sudrajat, 2008: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>).
4. Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administrasi dan kepemimpinan serta bidang instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, hanya akan menghasilkan peserta didik/konseli yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. (Mohammad Djawad Dahlan, 2007: 174, Sunaryo, 2008: 185)